

**“UPAYA PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
NATUNA DALAM PENGUSULAN GEOPARK NATUNA MENJADI
UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGGP)”**

Oleh

**Dang Azalea Tazkiya
NIM. 180564201015**

Abstrak

Geopark Natuna yang sudah berstatus sebagai Geopark Nasional sejak tahun 2018 dan telah direncanakan untuk diajukan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada tahun 2019. Adapun alasan pengajuan Geopark Natuna sebagai UGGp dilatarbelakangi oleh alasan yang bersifat ganda dan strategis, yakni untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkuat International Standing dari kedaulatan Indonesia di perairan Natuna. Untuk mendapatkan pengakuan Internasional merupakan sebuah proses lintas batas dimana hal yang biasa dilakukan adalah Diplomasi, pada kesempatan yang sama menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kedudukan Pemerintah Daerah boleh melakukan kegiatan lintas negara yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka Paradiplomasi adalah hal yang wajar dilakukan oleh sub nasional seperti pemerintah daerah. Walaupun Kabupaten Natuna Tidak secara terang-terangan menunjukkan kegiatan Paradiplomasi, namun dalam hal pengajuan UGGp pemerintah daerah lah yang lebih banyak berperan untuk mendukung berlangsungnya pengajuan tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana Upaya Paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam Pengusulan Geopark Natuna menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp)? Metode Penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan objek dan lokasi penelitian di Dinas Pariwisata Natuna dan Badan Pengelola Geopark Natuna. Keberhasilan Paradiplomasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Natuna dapat dilihat dari bagaimana Kementerian Luar Negeri sangat mendukung untuk menjadikan Geopark Natuna menjadi UNESCO Global Geopark.

Kata Kunci : Geopark Natuna, UNESCO Global Geopark, Paradiplomasi

"Efforts to Paradiplomize the Natuna Regency Local Government in Proposing the Natuna Geopark to Become a UNESCO Global Geopark (UGGp)"

By

**Dang Azalea Tazkiya
NIM. 180564201015**

Abstract

The Natuna Geopark, which has had the status of a National Geopark since 2018 and is planned to be submitted as a UNESCO Global Geopark (UGGp) in 2019. The reason for submitting the Natuna Geopark as a UGGp is motivated by dual and strategic reasons, namely to encourage sustainable development and strengthen International Standing of Indonesian sovereignty in Natuna waters. To get international recognition is a cross-border process where what is usually done is diplomacy, on the same occasion according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government that the Position of Regional Governments may carry out cross-border activities that do not conflict with the provisions of laws and regulations within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). So Paradiplomacy is a natural thing to do by sub-nationals such as local governments. Although Natuna Regency does not explicitly show Paradiplomacy activities, in terms of submitting UGGp, it is the local government that plays more of a role in supporting the process of the submission. The problem raised in this paper is how the Paradiplomacy Efforts of the Natuna Regency Government in Proposing the Natuna Geopark to become a UNESCO Global Geopark (UGGp)? The research method used is a qualitative method with the object and location of the research at the Natuna Tourism Office and the Natuna Geopark Management Agency. The success of the Paradiplomacy carried out by the Natuna Regency government can be seen from how the Ministry of Foreign Affairs is very supportive of making the Natuna Geopark a UNESCO Global Geopark.

Keywords: Natuna Geopark, UNESCO Global Geopark, Paradiplomacy